

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025**

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun pada akhir periode anggaran, pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 14 Februari 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BABI PENDAHULUAN.....	
Latar Belakang.....	
Dasar Hukum.....	
Tupoksi.....	
Permasalahan dan Isu Strategis.....	
Uraian Singkat Organisasi.....	
BABII PERENCANAAN KINERJA.....	
Perencanaan Strategis.....	
Perjanjian Kinerja.....	
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA.....	
Capaian Kinerja.....	
Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	
BAB IV PENUTUP.....	
Kesimpulan.....	
Perbaikan Kedepan.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan

sasaran, sehingga visi, misi program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diantaranya :

- 1) Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
- 2) Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pertumbuhan perpustakaan baik di sekolah maupun di desa/kelurahan;
- 4) Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan.
- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga banyak wilayah terpencil belum terlayani oleh mobil keliling perpustakaan.
- 6) Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah daerah;
- 7) Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip;
- 8) Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;
- 9) Terbatasnya SDM fungsional pustakawan dan Arsiparis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Adapun Visinya adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***.

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mendukung pelaksanaan misi yaitu ***“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten”***

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021– 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Kategori B	Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan;

2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan;
3. Meningkatkan Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno;
4. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan kompetensi SDM aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
		Pendampingan pengelolaan Kearsipan kepada setiap OPD
2	Pengembangan Inovasi pelayanan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan Perpustakaan
3	Pengembangan Inovasi Pengelolaan Kearsipan	Pengembangan pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan serta Pengawasan Tertib Arsip

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	90	Nilai Tingkat ketersediaan arsip di peroleh dari persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	15	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2023)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2024
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	72	72
2	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	85	90	90
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	15	15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤100%	Sangat Tinggi
76% ≤90%	Tinggi
66% ≤75%	Sedang
51% ≤65%	Rendah
≤50%	Sangat Rendah

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun perbandingan antara target dan realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15	62.52	416.80	Sangat Tinggi

2	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Persen	90	83.05	92.28	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
4	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
5	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
11	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	91.58	91.58	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	75	75.00	Tinggi
13	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
15	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

16	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
17	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	90.60	129.43	Sangat Tinggi
18	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
19	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
20	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
21	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	72.24	100.33	Sangat Tinggi
22	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
23	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75	100.00	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
26	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100.00	Sangat Tinggi
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40	100.00	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.6	3.1135	86.49	Sangat Tinggi
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60.12	93.94	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49.57	58.59	118.20	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8.95	9.81	109.61	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	94.46	94.46	-
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	87.88	87.88	Tinggi
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	73.59	73.59	Tinggi
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
39	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Sangat Tinggi
40	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100.00	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat.

Target kinerja indikator Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat 15 dengan realisasi 6.52 capaian kinerja sebesar 416.80 berdasarkan perhitungan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terlalu tinggi karena adanya perubahan metode perhitungan dari Perpustakaan Nasional (dari indeks ke dan Perangkat Daerah belum mereviu target di Renstra.

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No	Aktifitas Membaca	Nilai	Keterangan
1	UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan	0.3764	
2	UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi	0.2597	
3	UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0.6739	
4	UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan	0.2637	
5	UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP	1.0000	
6	UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan	0.8026	
7	UPLM 7 : Anggota Perpustakaan	1.0000	
Jumlah IPLM = Σ (UPLM 1 + UPLM 2 + UPLM 3 + UPLM 4 + UPLM 5 + UPLM 6 + UPLM 7) x 100		62.52	Sedang

Sumber Data : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

- 2). Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Target kinerja indikator Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sebesar 90 dengan realisasi 83.05

capaian kinerja sebesar 92.28 berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dengan perhitungan sebagai berikut :

**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI
YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**

No	No IKK	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1	2.w.1.1	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar	248,155.00	94.25%
			Arsip Aktif	263,282.00	
2	2.w.1.2	Persentase Arsip Inaktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsi (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar	62,046.00	100.00%
			Arsip Inaktif	62,046.00	
3	2.w.1.3	Persentase Arsip Statis Yang Telah Dibuatkan Sarana (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	35,729.00	100.00%
			Arsip Statis	35,729.00	
4	2.w.1.4	Persentase Jumlah Arsip Yang Dimasukkan Dalam SIKN Melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN	35,582.00	37.95%
			Arsip Dinamis dan Arsip Statis	93.765.00	
Jumlah			= (a + i + s + j)/4		83.05%

3). Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Target kinerja indikator Tingkat Mewujudkan kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Pertanggal 31 Maret 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen seluruh wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Maret 2024;
- b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian program dan keuangan terkait penghasilan PNS selama tahun 2024.

4). Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Target kinerja Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen layanan kepegawaian;
- b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen layanan kepegawaian; dan
- c. Pemenuhan data dukung dalam pemenuhan penilaian kedisiplinan kepegawaian.

5). Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP

Target kinerja Mewujudkan tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen rencana keuangan;
- b. Pemenuhan data dukung dalam pemenuhan penginputan pada aplikasi SIRUP.

6). Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau

Target kinerja Mewujudkan tingkat Kepatuhan Terlaksananya Input e-Pantau dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen rencana keuangan;
- b. Pemenuhan data dukung dalam pemenuhan penginputan pada aplikasi e-Pantau.

7). Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD

Target kinerja Mewujudkan tingkat Kepatuhan Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dari bidang perangkat daerah sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan;
- b. Tersedianya aplikasi SIMDA BMD.

8). Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)

Target kinerja Mewujudkan Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penyampaian Usulan Usulan SHS (Standar Harga Satuan) dari bidang perangkat daerah sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diusulkan.

9). Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP

Target kinerja Mewujudkan Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka pencapaian kinerja;
- b. Koordinasi dan kerjasama antara PPTK, Kepala Bidang dan Sekretaris.

10). Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD

Target kinerja Mewujudkan Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun;

b. Koordinasi dan kerjasama antara PPTK, Kepala Bidang dan Sekretaris

- 11). Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah
Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.
Target kinerja indikator Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91.58% sesuai target kinerja yang ditetapkan.
- 12). Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik Perangkat Daerah menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.
Target kinerja indikator Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75% sesuai target kinerja yang ditetapkan.
- 13). Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pada tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diberi mandat target kinerja indikator “Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti” belum ada temuan. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
- 14). Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP
Target kinerja Mewujudkan Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :
Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
 - a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan pelaporan Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja;

b. Koordinasi dan kerjasama antara PPTK, Kepala Bidang dan Sekretaris.

15). Penerapan Core Value ASN Berakhlak

Target kinerja Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader dan Tim Budaya Kerja” tahun 2023 sebanyak 4 Kegiatan dan terealisasi 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Tersedianya kebijakan kepala daerah terhadap implementasi ASN berakhlak;
- b. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

16). Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana

Target kinerja Mewujudkan Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;
- b. Koordinasi dan kerjasama antara Pelaksana, Kepala Bidang dan Sekretaris.

17). Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan

Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Target kinerja indikator Persentase Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit tahun 2024 sebesar 70% dan terealisasi sebesar 90.60% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan penyerapan anggaran;
- b. Koordinasi dan kerjasama antara PPTK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- c. Tersedianya Aplikasi SIPD.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran;

- b. Seringnya gangguan pada aplikasi SIPD sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan;
- c. Ketidaktepatan penyusunan anggaran dengan jadwal pembayaran;
- d. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang disusun.

18). Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD

Target kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal tanggal 10 Januari tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan Register Risiko sesuai jadwal yang ditetapkan.

19). Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target kinerja Laporan Penyusunan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

20). Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Target kinerja Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah dengan sebesar 100% atau capaian kinerja 100% dan sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen layanan;
- b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen layanan; dan
- c. Pemenuhan data dukung dalam pemenuhan penilaian Tata Kelola Kearsipan.

21). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 72 dan terealisasi sebesar 72.24 sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

22). Peningkatan Prestasi Inovasi

Pada tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat inovasi tentang perpustakaan dan kearsipan. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

23). Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Pada tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada pelaporan di SPAN lapor maka tidak ada perlu ditindak lanjuti. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

24). Meningkatnya Pengamanan Aset

Target kinerja indikator Pengamanan Aset Tanah tahun 2024 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 75%.

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Tersedianya Dokumentasi pengamanan aset tanah;
- b. Masih berprosesnya kepengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

25). Meningkatnya Tata Kelola Aset

Target kinerja indikator Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memaksimalkan pengelolaan aset;
- b. Kepatuhan dalam peminjaman aset dengan dibuktikan surat pinjam pakai (Pakta Integritas Pemakai Aset).

- 26). Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah
Target kinerja indikator Jumlah program pengentasan kemiskinan tahun 2024 sejumlah 1 inovasi dan terealisasi sejumlah 1 inovasi sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengurangi kemiskinan.
- 27). Pengarusutamaan Gender
Target kinerja indikator Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.
Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
a. Tersedianya aplikasi perhitungan GAP - GBS;
b. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang penunjukan perangkat daerah penggerak pengarusutamaan gender.
- 28). Kepatuhan Pelaporan P3DN
Target kinerja indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN tahun 2024 sebesar 40% dan terealisasi sebesar 40%.
Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :
a. Tersedianya aplikasi perhitungan P3DN;
b. Komitmen PPKom dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Produk dalam negeri.
- 29). Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Target kinerja indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dengan nilai 3.6 dan terealisasi sebesar 3.1135 belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
- 30). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Target kinerja Laporan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.
Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :
a. Komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Kepatuhan kepala perangkat daerah melaporkan data dukung SAKIP sesuai jadwal yang ditetapkan.

- 31). Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani
Target kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan nilai 64 dan terealisasi sebesar 60.12 belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
- 32). Meningkatnya Inovasi Daerah
Target kinerja indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 dengan nilai 49.57 dan terealisasi sebesar 58.59 sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah membuat inovasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.
- 33). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Target kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan nilai 8.95 dan terealisasi sebesar **9.81** sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Edaran Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
- 34). Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Target kinerja indikator Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar 94.46 sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Edaran Bupati Kutai Kartanegara terkait standar pelayanan publik.
- 35). Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape
Target kinerja indikator Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau dengan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung capaian target kinerja ini yaitu adanya Edaran Kepala Perangkat Daerah dan pemasangan alat peraga tentang larangan aktivitas merokok di lingkungan kantor.
- 36). Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Target kinerja indikator kinerja indikator IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) tahun 2024 dengan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 87.88 belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

37). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Target kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 73.59 belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

38). Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

39). Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah

Target kinerja indikator Pemetaan kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah tahun 2024 dengan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Adanya Edaran Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah tentang gerakan mengaji setiap pagi sebelum bekerja.

40). Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah

Target kinerja indikator Pembentukan UPZ Perangkat Daerah tahun 2024 dengan 1 surat keputusan dan terealisasi 1 surat keputusan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Adanya Edaran Bupati Kutai Kartanegara terkait Perangkat Daerah tentang pengumpulan dana zakat.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 203,14 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 209.68 %. Terjadi penurunan kinerja sebesar 6,54 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	95,20	134,08	72	72,24	100,33	Menurun
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	85	75,0003	88,24	90	83,05	92,28	Meningkat
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	14	56,94	406,71	15	62,52	416,80	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72.24	100,33
Tingkat Ketersediaan Arsip	90	83.05	92,28
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15	62.52	416,80

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100 % atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SasaranStrategis	Indikatorkinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90,64	9,69	
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	91,84	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	79,51	12,33	

Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	416,80	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	94,50	322,3	
--	--	--------	--	-------	-------	--

Pada umumnya capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut, berdasarkan data tersebut diatas dapat di analisis bahwa dari 3 (tiga) sasaran yang terdapat di dalam target rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 dan dihubungkan dengan capaian kinerja sasaran maka diperoleh gambaran Ke 3 (tiga) sasaran sudah efisien, Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 yaitu Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar Rp. 22.155.300.885,00 dan realisasinya Rp. 20.081.539.223,00 atau capaian kinerja sebesar 90,64 %. Target kinerja tercapai, tetapi terdapat Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Perencanaan keuangan dalam rekonsiliasi gaji melebihi Kebutuhan dan kesalahan dalam perencanaan Anggaran solusinya adalah penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan, Target kinerja tercapai.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2024 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 1.275.000.000,00 dan realisasinya Rp. 1.195.431.862,00 atau capaian kinerja sebesar 93,76 %.Target kinerja tercapai.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2024 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 925.000.000,00 dan realisasinya Rp. 817.313.946,00 atau capaian kinerja sebesar 88,36 %. Target kinerja tercapai.

4) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2024 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 75.000.000,00 dan realisasinya Rp. 42.314.000,00 atau capaian kinerja sebesar 56,42 %. Target kinerja Kurang tercapai dan terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada sub kegiatan.

5) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2024 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dengan target sebesar Rp. 8.707.000.000,00 dan realisasinya Rp. 7.842.165.270,00 atau capaian kinerja sebesar 90,07 %. Target kinerja tercapai tetapi terdapat kekeliruan dalam perencanaan di kode rekening/belanja pada sub kegiatan.

6) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2024 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dengan target sebesar Rp. 530.000.000,00 dan realisasinya Rp. 524.340.700,00 atau capaian kinerja sebesar 98,93 %. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	90.64	90.64	Perlunya suatu tatanan, SOP dan instrumen pertanggung jawaban sebagai data dukung dalam Pelaporan
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	100	79.51	79.51	Perlunya kajian/metode tentang Tata Kelola Arsip dan pengawasan arsip berbasis digital

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100	94,50	94,50	Adanya faktor yang mempengaruhi Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 90,60 %. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL		
		K	Satuan	K	Satuan	%.
	2.23.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22,155,300,885		20,081,539,223	90.64
	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		699,738,367		667,089,065	95.33
	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp93,738,367		Rp92,444,000	98.62%
1	2.23.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00%
	2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000	90.12%
2	2.23.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
	2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000	90.12%
3	2.23.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp256,000,000		Rp250,841,065	97.98%
4	2.23.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100.00%

2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp250,000,000		Rp233,684,000		93.47%
5	2.23.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,267,522,355		11,505,567,642		93.79
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp12,087,522,355		Rp11,335,507,642		93.78%
6	2.23.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,330	Orang/Bulan	1,330	Orang/Bulan	100.00%
2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
7	2.23.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp80,000,000		Rp79,940,000		99.93%
8	2.23.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
9	2.23.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80,000,000		79,977,000		99.97
2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp80,000,000		Rp79,977,000		99.97%
10	2.23.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000		188,560,544		94.28
2.23.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp200,000,000		Rp188,560,544		94.28%
11	2.23.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Orang	12	Orang	100.00%
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,250,000,000		2,979,803,285		91.69
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp200,000,000		Rp168,734,000		84.37%
12	2.23.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp400,000,000		Rp370,002,900		92.50%
13	2.23.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp100,000,000		Rp56,475,000		56.48%

14	2.23.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp850,000,000		Rp758,670,552		89.26%
15	2.23.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp800,000,000		Rp768,215,000		96.03%
16	2.23.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp550,000,000		Rp543,641,967		98.84%
17	2.23.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200	Laporan	100.00%
2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp250,000,000		Rp246,730,226		98.69%
18	2.23.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp100,000,000		Rp67,333,640		67.33%
19	2.23.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,408,040,163		3,904,974,168		88.59
2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp10,000,000		Rp9,900,000		99.00%
20	2.23.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp441,709,865		Rp425,866,527		96.41%
21	2.23.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp3,956,330,298		Rp3,469,207,641		87.69%
22	2.23.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	13	Laporan	100.00%
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,250,000,000		755,567,519		60.45
2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp150,000,000		Rp142,693,425		95.13%
23	2.23.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	100.00%
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp150,000,000		Rp149,320,399		99.55%
24	2.23.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	Unit	100.00%

2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp100,000,000		Rp98,710,000		98.71%
25	2.23.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206	Unit	206	Unit	100.00%
2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp850,000,000		Rp364,843,695		42.92%
26	2.23.01.2.09.0010.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100.00%
2.23.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		8,707,000,000		7,842,165,270		90.07
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5,307,000,000		4,651,965,486		87.66
2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Rp1,110,000,000		Rp1,092,367,160		98.41%
27	2.23.02.2.01.0001.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	layanan	2	layanan	100.00%
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp2,250,000,000		Rp1,772,848,730		78.79%
28	2.23.02.2.01.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp437,000,000		Rp427,678,000		97.87%
29	2.23.02.2.01.0003.01 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250	Eksemplar	250	Eksemplar	100.00%
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Rp300,000,000		Rp248,734,966		82.91%
30	2.23.02.2.01.0004.01 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3	Perpustakaan	3	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Rp25,000,000		Rp16,475,500		65.90%
31	2.23.02.2.01.0005.01 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp200,000,000		Rp169,991,500		85.00%
32	2.23.02.2.01.0006.01 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34	Orang	34	Orang	100.00%
2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Rp485,000,000		Rp477,725,100		98.50%
33	2.23.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48	layanan	32	layanan	66.67%

2.23.02.2.01.0008 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Rp300,000,000		Rp290,215,000		96.74%
34	2.23.02.2.01.0008.01 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46,590	Eksemplar	46,590	Eksemplar	100.00%
2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp200,000,000		Rp155,929,530		77.96%
35	2.23.02.2.01.0010.01 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3,400,000,000		3,190,199,784		93.83
2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Rp200,000,000		Rp136,003,478		68.00%
36	2.23.02.2.02.0001.01 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4	Lokus	4	Lokus	100.00%
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp2,550,000,000		Rp2,511,741,066		98.50%
37	2.23.02.2.02.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Rp200,000,000		Rp184,017,500		92.01%
38	2.23.02.2.02.0003.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Rp350,000,000		Rp307,900,240		87.97%
39	2.23.02.2.02.0004.01 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3	Perpustakaan	3	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp50,537,500		50.54%
40	2.23.02.2.02.0005.01 Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3	Orang	3	Orang	100.00%
2.23.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		530,000,000		524,340,700		98.93
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		180,000,000		177,283,500		98.49
2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp80,000,000		Rp78,751,500		98.44%
41	2.23.03.2.01.0001.01 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp100,000,000		Rp98,532,000		98.53%
42	2.23.03.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Eksemplar	5	Eksemplar	100.00%

2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		350,000,000		347,057,200		99.16
2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp300,000,000		Rp298,337,200		99.45%
43	2.23.03.2.02.0001.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300	Eksempalar	300	Eksempalar	100.00%
2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp50,000,000		Rp48,720,000		97.44%
44	2.23.03.2.02.0002.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300	Eksempalar	300	Eksempalar	100.00%
2.24.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		1,275,000,000		1,195,431,862		93.76
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		625,000,000		589,434,912		94.31
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Rp150,000,000		Rp149,219,484		99.48%
45	2.24.02.2.01.0001.01 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Rp75,000,000		Rp66,428,000		88.57%
46	2.24.02.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp400,000,000		Rp373,787,428		93.45%
47	2.24.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	4	Laporan	100.00%
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000		125,600,000		83.73
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Rp150,000,000		Rp125,600,000		83.73%
48	2.24.02.2.02.0002.01 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	24,500	Arsip	24,500	Arsip	100.00%
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		500,000,000		480,396,950		96.08
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp480,396,950		96.08%
49	2.24.02.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	laporan	5	laporan	100.00%
2.24.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		925,000,000		817,313,946		88.36
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		200,000,000		168,952,500		84.48
2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Rp200,000,000		Rp168,952,500		84.48%
50	2.24.03.2.01.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1,000	Arsip	1,000	Arsip	100.00%

2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		200,000,000		193,644,000		96.82
2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Rp200,000,000		Rp193,644,000		96.82%
51	2.24.03.2.02.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Berkas	671	Berkas	134.20%
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		225,000,000		206,130,000		91.61
2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp62,870,000		83.83%
52	2.24.03.2.03.0001.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Daftar	500	Daftar	100.00%
2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp150,000,000		Rp143,260,000		95.51%
53	2.24.03.2.03.0002.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100,000,000		99,256,996		99.26
2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Rp100,000,000		Rp99,256,996		99.26%
54	2.24.03.2.04.0002.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		200,000,000		149,330,450		74.67
2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		Rp200,000,000		Rp149,330,450		74.67%
55	2.24.03.2.05.0001.01 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		75,000,000		42,314,000		56.42
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		75,000,000		42,314,000		56.42
2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Rp75,000,000		Rp42,314,000		56.42%
56	2.24.04.2.01.0002.01 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12	Arsip	12	Arsip	100.00%
JUMLAH		33,667,300,885		30,503,105,001		90.60

Table 3.7

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 91,65 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		REALISASI		
		K	Satuan	K	Satuan	Capaian
2.23.2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan		Rp6,498,281,000		Rp5,787,559,806		89,13%
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp4,588,281,000		Rp4,303,070,916		93,85%
2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Rp1,110,000,000		Rp1,106,283,500		99.67%
1	2.23.02.2.01.01.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	Layanan	2	Layanan	100.00%
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp1,943,281,000		Rp1,816,970,529		93.50%
2	2.23.02.2.01.02.01 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8	Perpustakaan	8	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp72,279,600		96.37%
3	2.23.02.2.01.03.01 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250	Eksemplar	250	Eksemplar	100.00%
2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Rp350,000,000		Rp297,409,599		84.97%
4	2.23.02.2.01.04.01 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12	Perpustakaan	12	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Rp25,000,000		Rp15,536,000		62.14%
5	2.23.02.2.01.05.01 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp300,000,000		Rp240,772,538		80.26%
6	2.23.02.2.01.06.01 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105	Orang	105	Orang	100.00%
2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Rp185,000,000		Rp171,509,100		92.71%

7	2.23.02.2.01.07.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48	Layanan	48	Layanan	100.00%
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Rp300,000,000		Rp294,534,500		98.18%
8	2.23.02.2.01.09.01 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46,590	Eksemplar	46,589	Eksemplar	100.00%
2.23.2.02.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp300,000,000		Rp287,775,550		95.93%
9	2.23.2.02.01.10.01 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp1,910,000,000		Rp1,484,488,890		77,71%
2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Rp270,000,000		Rp157,669,900		58.40%
10	2.23.02.2.02.01.01 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	9	Lokus	9	Lokus	100.00%
2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp488,516,235		97.70%
11	2.23.02.2.02.02.01 Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Rp300,000,000		Rp255,360,100		85.12%
12	2.23.02.2.02.03.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7	Orang	7	Orang	100.00%
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Rp790,000,000		Rp536,206,455		67.87%
13	2.23.02.2.02.04.01 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	29	Perpustakaan	29	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp50,000,000		Rp46,736,200		93.47%
14	2.23.02.2.02.05.01 Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3	Orang	3	Orang	100.00%
2.23.2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Rp320,000,000		Rp256,423,300		80,14%
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Rp180,000,000		Rp128,144,700		71,24%
2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp80,000,000		Rp55,693,700		69.62%
15	2.23.03.2.01.01.01 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp100,000,000		Rp72,451,000		72.45%

16	2.23.03.2.01.02.01 Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Eksemplar	5	Eksemplar	100.00%
	2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp140,000,000		Rp128,278,600		91,62%
	2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp90,000,000		Rp86,793,200		96.44%
17	2.23.03.2.02.01.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300	Eksemplar	300	Eksemplar	100.00%
	2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Rp50,000,000		Rp41,485,400		82.97%
18	2.23.03.2.02.02.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300	Eksemplar	300	Eksemplar	100.00%
	2.24.2.24.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31,741,717,028		Rp29,536,891,567		93,13%
	2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp579,738,367		Rp576,189,397		99,44%
	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp73,738,367		Rp73,558,900		99.76%
19	2.24.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00%
	2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp256,000,000		Rp255,606,613		99.85%
20	2.24.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp250,000,000		Rp247,023,884		98.81%
21	2.24.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10,963,860,219		Rp10,031,403,497		91,56%
	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10,883,860,219		Rp9,951,413,497		91.43%
22	2.24.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,330	Orang/Bulan	1,330	Orang/Bulan	100.00%
	2.24.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp80,000,000		Rp79,990,000		99.99%
23	2.24.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp80,100,000		Rp80,100,000		100,00%
	2.24.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp80,100,000		Rp80,100,000		100.00%
24	2.24.01.2.03.05.01Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%

2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp1,068,816,000		Rp1,023,525,427		95,85%
2.24.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp300,000,000		Rp263,829,187		87.94%
25	2.24.01.2.05.09.01 Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30	Orang	30	Orang	100.00%
2.24.01.2.05.01 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp420,000,000		Rp412,457,240		98.20%
26	2.24.01.2.05.01.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600	Orang	600	Orang	100.00%
2.24.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp348,816,000		Rp347,239,000		99.55%
27	2.24.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130	Paket	130	Paket	100.00%
2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp11,591,375,374		Rp10,615,407,145		91,62%
2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp146,466,000		Rp144,819,600		98.88%
28	2.24.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	17	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp9,094,029,374		Rp8,143,865,950		89.55%
29	2.24.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	60	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp300,000,000		Rp290,462,900		96.82%
30	2.24.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	43	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp122,050,000		Rp121,399,310		99.47%
31	2.24.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp380,000,000		Rp376,181,100		99.00%
32	2.24.01.2.06.06.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,580	Dokumen	5,580	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material		Rp741,330,000		Rp736,172,676		99.30%
33	2.24.01.2.06.07.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	Paket	8	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp330,000,000		Rp328,003,915		99.40%
34	2.24.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200	Laporan	100.00%
2.24.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp350,000,000		Rp347,088,694		99.17%
35	2.24.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,500	Dokumen	1,500	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp127,500,000		Rp127,413,000		99.93%

36	2.24.01.2.06.11.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp3,545,000,000		Rp3,528,260,000		99.54%
2.24.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp2,045,000,000		Rp2,039,860,000		99.75%
37	2.24.01.2.07.01.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	6	Unit	6	Unit	100.00%
2.24.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp1,500,000,000		Rp1,488,400,000		99.23%
38	2.24.01.2.07.02 .02 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	7	Unit	5	Unit	71.43%
2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1,469,137,068		Rp1,327,403,921		90.40%
2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp7,000,000		Rp6,990,000		99.86%
39	2.24.01.2.08.01.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1	Laporan	8.33%
2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp383,190,024		Rp277,972,286		72.54%
40	2.24.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp1,078,947,044		Rp1,042,441,635		96.62%
41	2.24.01.2.08.04.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2,443,690,000		Rp2,354,602,180		96.41%
2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp250,000,000		Rp230,567,830		92.23%
42	2.24.01.2.09.01.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp348,000,000		Rp283,119,100		81.36%
43	2.24.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp295,690,000		Rp294,396,000		99.56%
44	2.24.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	296	Unit	296	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp1,550,000,000		Rp1,546,519,250		99.78%
45	2.24.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	9	Unit	100.00%

2.24.2.24.02 Program Pengelolaan Arsip		Rp1,860,322,000		Rp1,626,128,500		87,46%
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Rp1,010,322,000		Rp911,729,771		89,14%
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Rp343,962,000		Rp306,862,851		89.21%
46	2.24.02.2.01.01.01 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1,00 0	Berkas	1,00 0	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Rp75,000,000		Rp72,771,100		97.03%
47	2.24.02.2.01.02.01 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,00 0	Berkas	1,00 0	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp591,360,000		Rp532,095,820		89.98%
48	2.24.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Laporan	30	Laporan	100.00%
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Rp350,000,000		Rp214,547,346		61.30%
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Rp350,000,000		Rp214,547,346		61.30%
49	2.24.02.2.02.02.01 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2,40 0	Arsip	2,40 0	Arsip	100.00%
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp499,851,383		99.97%
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp499,851,383		99.97%
50	2.24.02.2.03.02.01 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	Laporan	5	Laporan	100.00%
2.24.2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		Rp775,000,000		Rp545,029,398		70,35%
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Rp350,000,000		Rp188,739,148		53.93%
2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Rp350,000,000		Rp188,739,148		53.93%
51	2.24.03.2.01.01.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1,00 0	Arsip	1,00 0	Arsip	100.00%
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp67,311,400		89.75%
2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Rp75,000,000		Rp67,311,400		89.75%
52	2.24.03.2.02.01.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	500	Arsip	100.00%

2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Rp175,000,000		Rp170,512,750		97,40%
2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp72,791,800		97.06%
53	2.24.03.2.03.01.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Daftar	500	Daftar	100.00%
2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp97,720,950		97.72%
54	2.24.03.2.03.02.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp74,488,000		74.49%
2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Rp100,000,000		Rp74,488,000		74.49%
55	2.24.03.2.04.02.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Rp75,000,000		Rp43,978,100		58.64%
2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		Rp75,000,000		Rp43,978,100		58.64%
56	2.24.03.2.05.01.01 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.2.24.04 Program Perijinan Penggunaan Arsip		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
57	2.24.04.2.01.02.01 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12	Izin	11	Izin	91.67%
JUMLAH		Rp 41,270,320,028		Rp 37,823,726,171		91,65%

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi Penurunan realisasi anggaran sebesar 1,05 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 rata-rata sebesar 90,60 % (Sangat tinggi). dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar 90,64 % (Sangat tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program Pengelolaan Arsip Sebesar 93,76 % (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 88,36 % (Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Program Perizinan Penggunaan Arsip Sebesar 56,42 % (Rendah).
- 5) Capaian kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Sebesar 90,07 % (Sangat Tinggi).
- 6) Capaian kinerja Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Sebesar 98,93 % (Sangat tinggi).

Capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 91,65 % atau terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 1,05 %.

4.2 Perbaikan Ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi, program anggaran, keuangan dan aset pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Arsip Perangkat Daerah yang efektif dan Efisien
- 3) Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembangunan Literasi Masyarakat terhadap perpustakaan .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 14 Februari 2025

